

**PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN DAERAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

Disusun oleh :

KHOERUL ANAM

11340174

PEMBIMBING :

1. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
2. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah. Penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah, Sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis yang sebelumnya mencapai 1.8 triliun sedangkan setelah pemekaran mengalami penurunan yang signifikan yaitu sekitar 1.45 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis sebelumnya sebagian besar bersumber dari daerah Kabupaten Pengandaran. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya inovasi dan kreasi baru yang lebih proaktif untuk mengembangkan potensi lainnya yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah, diantaranya mengoptimalkan perpajakan, pengembangan potensi daerah Kabupaten Ciamis dapat diarahkan dan difokuskan pada pengembangan agribisnis dan pariwisata budaya sebagai pengganti pendapatan yang berasal dari daerah pengandaran. Maka kondisi inilah yang kemudian penelitian ini peneliti angkat mengapa pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis mengalami penurunan setelah pemekaran, Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan PAD, dan apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta teknik analisis deskriptif kualitatif dan disajikan dalam kerangka berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa PAD Kabupaten Ciamis yang sebelumnya mencapai 1,867,335,578,125, berbeda halnya dengan keadaan PAD Kabupaten Ciamis setelah pemekaran daerah yaitu mengalami penurunan yang signifikan hanya 1,449,007,000,000 hal ini dikarenakan wilayah yang dimekarkan yaitu Kabupaten Pengandaran selama ini merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah, jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis khususnya kawasan wisata. Upaya pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya melakukan dekonsentrasi, pengoptimalan perpajakan, mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam agar lebih optimal dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan PAD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoerul Anam

NIM : 11340174

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “*Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran Daerah*” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015

Yang menyatakan,



Khoerul Anam
NIM. 11340174



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khoerul Anam

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khoerul Anam

NIM : 11340174

Judul : "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis
Setelah Pemekaran"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015

Pembimbing I

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum

NIP. 19650210 199303 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khoerul Anam

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khoerul Anam
NIM : 11340174
Judul : "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

NIP. 1977017 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0572/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOERUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 11340174
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Desember 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Pengaji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Pengaji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 02 Desember 2015



Dr. H. Syaikh Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyiroh 5-6)

”عش كريما او مت شهيدا“

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah...

My Sweet Heart "V-Afonsonia"

Sebagai tanda cinta kasihku, Surya persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Terima kasih "ay"....

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Dr. Sri Wahyuni, M.Ag.,M.Hum selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak ibu.., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran ibu.

Dan para Sahabat yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan serta Do'anya serta

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلوة والسلام على خير الانعام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

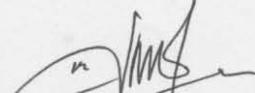
Alhamdulillahi Rabbil 'alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran Daerah" sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum dan TU Juruan Ilmu Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Yayan M.Supyan dan Bapak Fauzi Mulyana yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan data-data yang bersangkutan dengan judul skripsi penyusun.
8. Orang tua yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011.
10. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 01 Oktober 2015



Khoerul Anam
NIM : 11340174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode penelitian.....	19
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM NEGARA HUKUM DI INDONESIA	26
A. Konsep Negara Hukum	26
1. Pengertian Negara Hukum.....	26
2. Negara Hukum di Indonesia	29

B. <i>Good Governance</i> dalam Negara Hukum	31
1. Konsep dan Pengertian <i>Good Governance</i>	31
2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	35
3. Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i>	42
C. Pemerintah Daerah	43
1. Konsep Pemerintah Daerah	43
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daaerah.....	46
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	53
1. Pengertian PAD	53
2. Sumber-sumber PAD.....	54
3. Dasar-dasar Hukum PAD	60
4. Pengelolaan PAD.....	61
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIAMIS DAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	66
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Ciamis	66
1. Letak Geografis	66
2. Keadaan Demografis	69
3. Kondisi Pemerintahan.....	71
B. Keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Sebelum dan Setelah Pemekaran	79
1. PAD Kabupaten Ciamis Sebelum Pemekaran.....	79
2. PAD Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran	82
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	84
BAB IV ANALISA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS	87

A. Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	87
B. Analisis Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis	91
C. Analisis Tinjauan Undang-undang terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis	106
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari 33 provinsi, yang masing-masing provinsi tersebut setelah berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah (mulai tahun 1974 sampai sekarang) telah memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya pun di butuhkan sebuah administrasi pemerintah daerah. Bentuk Negara kesatuan yang dianut oleh Negara Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai Negara kesatuan, Negara kesatuan republic Indonesia mengakui keberadaan daerah sebagai bagian dari Negara. Sebagai bagian dari pemerintah nasional, daerah tetap merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi disisi lain setiap daerah memiliki hak untuk mengelola daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum.

- d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.¹

Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat “staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten dan kota. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi saja, semuanya menurut aturan akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah otonom akan diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu di daerahpun penyelenggaraan pemerintahnya akan bersendi atas dasar permusyawaratan.²

Kondisi pemerintah di daerah saat ini sedang mengalami tantangan besar. Di satu sisi mereka harus siap menerapkan desentralisasi, yang juga berarti memainkan peranan melebihi apa yang selama ini di jalankannya. Padahal, selama ini birokrasi di daerah di anggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri

¹Pasal 18 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 7- 8.

dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintah yang bersih dan transparan.³

Urusan pemerintah yang bersifat pilihan, dirumuskan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan, yang di sesuaikan dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pembagian satuan-satuan pemerintahan dalam hubungan hierarki merupakan konsekuensi logis bentuk Negara kesatuan, dan pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan di samping pembinaan dan kerja sama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan serta vertical kepada satuan-satuan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang di terima daerah sebagai pendapatan daerah.⁴

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Semua jenis pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah artinya pendapatan tersebut berasal dari

³Hetifah Sumarto, *Inovasi, Parisipasi dan Good Governance*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 86-87.

⁴Titik Triwulan dan Ismu Ginandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 218.

potensi daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran pendapatan asli daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.⁵

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* masyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah di tuntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.⁶

Terhadap pendapatan dan alokasi anggaran daerah, masyarakat dan *stakeholders* juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai jumlah pendapatan dan anggaran yang di alokasikan untuk suatu kegiatan termasuk juga alasan yang melatarbelakanginya. Masyarakat dan *stakeholders* perlu mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memiliki akses terhadap informasi mengenai pendapatan dan alokasi anggaran maka mereka dapat menilai seberapa banyak uang yang dimiliki pemerintah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat dan *stakeholders* juga perlu mengetahui apakah kebijakan pemerintah beserta

⁵HAW. Widjaja, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42.

⁶Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 223.

sejumlah sumber daya yang mendukungnya benar-benar menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.⁷

Era otonomi daerah yang sedang bergulir di Indonesia dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat, baik secara lokal maupun nasional.

Kurang lebih sudah dua belas tahun kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan, hal ini memberikan suatu kesadaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat, bahwa kondisi dan gelombang otonomi daerah tidak bisa kita biarkan mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan tindakan yang lebih nyata dan proaktif. Salah satunya adalah upaya untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas baik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun kualitas lainnya, yang akan berdampak pada kualitas pembangunan di daerah.

Dalam langkah awal untuk menuju suatu keberhasilan pembangunan daerah, sangat penting kiranya untuk mengetahui gambaran umum berbagai potensi dan masalah yang ada dalam suatu wilayah pembangunan di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar prioritas pembangunan di lokasi tersebut dapat diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki dan mengatasi masalah-masalahnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitarnya.

⁷Ibid., hlm. 224.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 244.417 ha, dan memiliki potensi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa sumber data yang diperoleh, secara umum dapat disebutkan bahwa potensi daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari potensi pertanian, perdagangan dan industri kecil, serta potensi pariwisata dan budaya. Sementara ini pengembangannya relatif masih belum optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan terutama dalam masalah permodalan/dana dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Disamping itu, pemekaran daerah Kecamatan Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, memberikan pengaruh yang signifikan yang sebelum pemekaran mencapai 1.8 triliun sedangkan setelah pemekaran hanya sekitar 1.4,5 triliun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Ciamis, dikarenakan selama ini pangandaran menjadi aset penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya inovasi dan kreasi baru yang lebih proaktif untuk mengembangkan potensi lainnya yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah, misalnya pengembangan potensi daerah Kabupaten Ciamis dapat diarahkan dan difokuskan pada pengembangan agribisnis dan pariwisata budaya. Melihat Kabupaten Ciamis merupakan peninggalan sejarah

Kerajaan Galuh yang begitu banyak mewariskan budaya dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis setelah terjadinya pemekaran daerah maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan skripsi yang berjudul Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis mengalami penurunan setelah pemekaran?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?
3. Apakah upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui alasan mengapa pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis mengalami penurunan.

- b. Mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
- c. Mengetahui apakah upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam bidang pendapatan asli daerah.
2. Untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi khususnya dalam hal menyelesaikan permasalahan pendapatan asli daerah.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang undang-undang pendapatan asli daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dengan di adakanya penelitian ini maka di harapkan dapat bermanfaat bagi semua orang, dalam hal upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Untuk memberikan tambahan ilmu tentang undang-undang pendapatan asli daerah.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai referensi, ternyata belum dijumpai penelitian yang membahas secara spesifik terkait ”Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran”.

Namun demikian, kajian mengenai Peningkatan dan keuangan daerah secara umum telah banyak diteliti. Tesis Bambang Riyanto yang berjudul “Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo,”⁸ penelitian ini mengkaji pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kabupaten Sukoharjo serta untuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo serta permasalahan yang di hadapi. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, Minimnya anggaran serata kurangnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan. Usaha-

⁸Bambang Riyanto, “Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo,” *Tesis*, Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) serta kerja sama dengan perguruan tinggi, menaikkan anggaran dalam mendukung pelaksanaan Visi, Misi dan tujuan serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar satuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan adalah penelitian ini membahas pelaksanaan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan daerah di kabupaten Sukoharjo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan adalah sama-sama membahas tentang keuangan daerah.

Skripsi Nurfadillah yang berjudul “Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”.⁹ Penelitian ini mengkaji kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintah masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang di anggap berpotensi untuk menggenjot keuangan daerah adalah pajak reklame. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu penelitian ini mengkaji Pengelolaan Pajak untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. Persamaan

⁹Nurfadillah “Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”. *Skripsi*, Program studi administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Skripsi Ulfa yang berjudul “Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji Pemerintah di tuntut untuk mandiri dalam menangani segala urusan pendanaan baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari retribusi pasar sentral yang dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun ini antara target dan realisasi anggaran dari penerimaan retribusi pasar sentral belum mencapat target yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bulukumba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu penelitian ini mengkaji Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang meningkatkan pendapatan asli daerah.

Skripsi Arif Fahmi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Peningkatan

¹⁰Ulfa “Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba”. *Skripsi*, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unibersitas Hasanudin, 2013.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Prespektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan peran kepariwisataan terhadap penerimaan pendapatan cukup memberikan pemasukan kepada daerah dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini didukung dengan keberagaman objek pariwisata yang meliputi: wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner, wisata minat khusus, dan wisata belanja. Adapun yang menjadi hambatan dari penyelenggaraan kepariwisataan meliputi: daya dukung infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia (SDM), dan keramahan. Pengelolaan pendapatan adli daerah di Kota Yogyakarta dalam konsep Kepariwisataan didasarkan kepada sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu penelitian ini mengkaji Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Prespektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

¹¹Arif Fahmi “Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Prespektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi Angga Pradikta yang berjudul “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gununggrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati”.¹² Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan obyek wisata waduk gununggrowo indah, strategi pengembangan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam mengembangkan obyek wisata waduk gununggrowo indah dan seberapa besar kontribusi obyek wisata waduk gununggrowo indah untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pati. Dari penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan upaya pemerintah Kabupaten Pati dalam mencari strategi mendorong dan mengembangkan terhadap obyek wisata waduk gununggrowo indah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu penelitian ini mengkaji Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gununggrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Skripsi Tri Setyaningsih yang berjudul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”.¹³ Penelitian ini mengkaji Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten

¹²Angga Pradikta “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gununggrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

¹³Tri Setyaningsih “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan pajak di Kabupaten Sleman. Dari penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai otoritas penuh dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah, dan adanya staf BPKKD yang cukup memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya SDM khususnya staf di lapangan, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pajak daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu penelitian ini mengkaji Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa negara indonesia berdasar atas hukum (*rechstaats*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktifitasnya atas dasar kekuasaannya belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.¹⁴

Menurut satjipto Raharjo, hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.

Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakekatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaranya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Lain halnya dengan pendapat wirjono prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya adalah :

- a. Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah di artikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Demikian eratnya paham

¹⁴C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 86-87.

negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtstaat*.

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai negara hukum (*rechtstaat/the Rule of law*). Dalam penjelasan UUD 1945, pernah dinyatakan,” indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Perubahan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasar dan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.¹⁵

2. Teori Dekonsentrasi

Tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembbiayaannya. Unsur pelaksanaanya adalah terutama instansi-instansi vertikal yang di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukan selaku perangkat

¹⁵Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Renofasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 62-64.

pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.¹⁶

3. Teori *Good Governance*

Dalam praktik penyelenggaraan Negara dan seiring berkembangnya demokrasi, tuntutan terhadap pemerintah untuk menyelenggarakan negara dengan baik dan semakin kuat. Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menerapkan asas-asas yang kemudian dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, *Good Governance* adalah proses menyelenggarakan proses kekuasaan negara, dalam melaksanakan penyediaan public *good and service* disebut *Governance* (Pemerintahan), sedangkan dalam praktik tersebut disebut *Good Governance* (Kepemimpinan yang baik). Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat.¹⁷

Good Governance adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses kepemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹⁸

¹⁶B.N. Marbun, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*, (Jakarta : Ghilia Indonesia,1983), hlm. 25-26.

¹⁷Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 33-35.

¹⁸Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*,(Bandung: CV Pustaka setia, 2012), hlm. 202.

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yaitu :

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada dua hal, yaitu :

- a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
- b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Pada dasarnya, tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) harus memenuhi kriteria berikut :

- 1). Partisipasi;
- 2). Transparansi;
- 3). Akuntabilitas;
- 4). Efektifitas;
- 5). Memperlakukan semua sama.¹⁹

¹⁹*Ibid*, hlm. 208-209.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan terhadap permasalahan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ciamis setelah pemekara.

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang di lakukan untuk menganalisis sejauh mana upaya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berlaku secara efektif. Dalam hal ini yuridis di gunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-udangan tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan empiris di pergunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat mengetahui tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam metode Yuridis Empiris, yang menjadi permasalahan adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* artinya ada ketidak sesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

c. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini, di gunakan sumber bahan hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh antara lain:

1). Data Primer

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dilapangan.

2). Data Sekunder

(a) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari:

- (1) Undang-undang Dasar 1945
- (2) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penyusun dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penyusunan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel dan lain-lain. Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk penelitian antara lain :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008.
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang member petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini di lakukan dengan cara :

a. Observasi

Setelah menemukan permaslahan dari hasil pra penelitian dan melakukan study pustaka, selanjutnya penulis berusaha melakukan pengamatan terhadap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ciamis. Observasi ini di maksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan keuangan daerah di Kabupaten Ciamis setelah pemekaran.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di lakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan kasi penagihan bidang pajak daerah (Bapak yayan M. Supyan) dan kepala seksi perencanaan penyusunan dan belanja langsung (Bapak Fauzi Mulyana) di kantor pemerintahan Kabupaten Ciamis guna mencapai hasil yang di harapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi di pilih oleh penyusun karena pada teknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis setelah pemekaran.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data di peroleh maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar di peroleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang di angkat, maka penulis berusaha untuk

menyusun penulisan ini secara sistematis. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari subbab latar belakang yang menjadi alasan penelitian ini. rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan di angkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka pikir yang akan di gunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berisi penjelasan langkah-langkah yang harus di tempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan ruang lingkup pembicaraan dan urutan pembicaraan.

Bab kedua berisi tinjauan umum pendapatan asli daerah dalam negara hukum di Indonesia. Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai negara hukum, konsep dan pengertian *good governance*, pemerintahan daerah, dan Pendapatan asli daerah hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga memuat penjelasan Gambaran umum Kabupaten Ciamis dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Bab ini berisi penjelasan keadaan pendapatan asli daerah antara sebelum dan setelah pemekaran dan upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mempermudah memahami pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya.

Bab keempat Menjelaskan pembahasan dan analisa yang terdiri atas subbab-subbab mengenai alasan pendapatan asli daerah mengalami penurunan, upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis dan dasar hukum upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Bab kelima berisi kesimpulan analisa yang di lanjutkan dengan bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis setelah pemekaran mengalami penurunan yang sangat signifikan, karena pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis didapat dari beberapa sektor perpajakan yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah yang notabene berada di wilayah pengandaran seperti pantai karapyak, pantai karangmini, pantai pengandaran, cagar alam, pantai batu hiu, pantai batu karas, green canyon, dan citumang yang mana wilayah tersebut merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis, dan saat ini sudah tidak lagi masuk kedalam wilayah Kabupaten Ciamis.
2. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meminta kebijakan PBB kepada Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi), Mengoptimalkan perpajakan baik dari segi pengelolaan, pengawasan maupun sosialisasi tentang perpajakan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan kepada pegawai maupun perwakilan masyarakat, dan

Otomatisasi Sumber Daya Alam sebagai pengganti pendapatan daerah dari wilayah Pengandaran.

3. Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 12 tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaanya dilapangan Dinas pendapatan daerah Kabupaten Ciamis sudah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai amanat Undang-undang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang menonjol di antaranya adalah:

1. Pemerintahan Kabupaten Ciamis harus tegas dalam melaksanaan Perda pajak. Kondisi ini terlihat dari masih adanya sistem kompromi dalam pemungutan pajak terutama pada pajak restoran. Untuk mengatasi hal ini perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat keobyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat

terbuka lebar peluangnya, mengingat potensi pajak yang ada di Kabupaten Ciamis masih banyak yang belum ditarik ataupun diidentifikasi.

2. Pemerintahan Kabupaten Ciamis harus lebih mengoptimalkan lagi dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam, karena masih banyak potensi-potensi di daerah Kabupaten Ciamis yang belum maksimal/masih setengah-setengah dalam mengelolanya, diantaranya Situ Lengkong Panjalu, Curug Tujuh Cibolang, Mega Wisata Icakan, karang kamulyan, Situs Astana gede dan yang lainnya. Wilayah-wilayah ini apabila dikelola lebih maksimal lagi maka bisa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengelola keuangan daerah agar bisa transparan kepada masyarakat dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik melalui media elektronik website maupun majalah dengan mempublikasikan informasi secara tertib terkait proses kebijakan public, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, Karen sampai saat ini pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan belum trnsparan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses atau mengotrol tentang keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Artikel /Penelitian

- Alwi Wahyudi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Renofasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anggara Sahya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara kajian konsep, teori dan fakta dalam upaya menciptakan Good Governance*, CV Pustaka setia :Bandung.
- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia)* , Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Azhary Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada period Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana :Jakarta.
- B.N. Marbun, 1983, *DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depannya*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2004, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Dwiyanto Agus, 2006, *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press : Yogyakarta.
- Huda Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo: Jakarta.

HAW. Widjaja, 2003, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Hakim Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jeddawi Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media: Yogyakarta.

Koesoemahatmaja, 1979, *Pengantar kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta Karya: Bandung.

Kuncoro Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluan)*, Erlangga: Jakarta.

Latief Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press: Yogyakarta.

Mahfud Moh., MD., 2011, *Membangun Politik Hukum,Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press: Jakarta.

Nurcholis Hanif, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta.

Nurcholis Hanif dkk, 2011, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka: Jakarta.

Rosidin Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia: Bandung.

Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, UII pers: Yogyakarta.

Sumarto Hetifah, *Inovasi, parisipasi dan good governance*, Yayasan obor Indonesia : Jakarta.

Syaukani HR, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Solthan Azikin, 2011, *Format Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*, Ombak: Yogyakarta.

Sabrno Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika: Jakarta.

Sudarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju: Bandung.

Triwulan Titik dan Ginandi Ismu Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hokum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana: Jakarta.

Thaib Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media: Yogyakarta.

Wiwoho Jamal, (Doden S1, S2 dan S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret), *Negara Hukum dan Demokrasi*, makalah.

Wasistiono Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media: Bandung.

Wibawa Samodra, 2005, *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Gava Media: Yogyakarta.

Sumber Data Kabupaten Ciamis 2014

Bambang Riyanto, "Pelaksanaan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Sukoharjo,” *Tesis*, Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Nurfadillah “Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”. *Skripsi*, Program studi administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.

Ulfa “Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba”. *Skripsi*, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unibersitas Hasanudin, 2013.

Arif Fahmi “Implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Prespektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Angga Pradikta “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gununggrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati”, *Skripsi*,Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013.

Tri Setyaningsih “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 21 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pengandaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

INTERNET

<http://bappeda.ciamiskab.go.id/rpjmd/gambaran-umum/> akses 15 september 2015

<http://www.pemumkabciamis.com/index.php> akses 15 september 2015

<http://nurhakimramdani.blogspot.co.id/2014/10/potensi-agribisnis-dan-parawisata.html> akses 15 september 2015.

<http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/01/Negara-Hukum-dan-Demokrasi.pdf>

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.009 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 Agustus 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala-BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Khoerul Anam	11340174	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Ciamis di bagian Pendapatan dan Alokasi keuangan Daerah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN DAERAH"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Agustus 2015

Nomor : 074 /2011/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.009/1362/2015

Tanggal : 5 Agustus 2015

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN DAERAH**", kepada:

Nama : KHOERUL ANAM

NIM : 11340174

No. H.P/KTP : 087826130407 / No. KTP 3207172909920002

Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lokasi : Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Waktu : 10 Agustus s.d. 30 September 2015

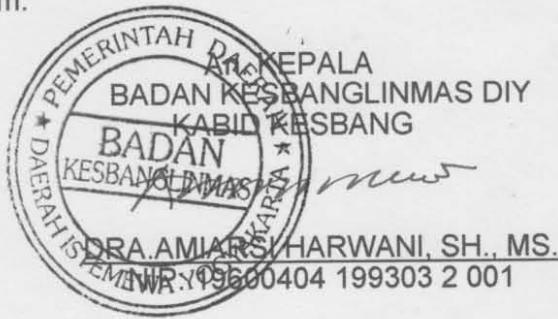
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpol@jabarprov.go.id

B A N D U N G

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073/1589/VIII/Rekomlit/KESBAK/2015

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan surat dari : Kepala Badan Kesbanglinmas DIY Kabid Kesbang
Nomor : 074/2011/Kesbang/2015
Tanggal : 16 Agustus 2015
Menerangkan bahwa :

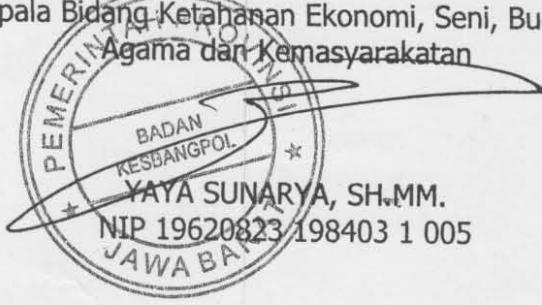
a.	N a m a	:	KHOERUL ANAM
b.	Tlp/Email	:	087826130407 / cikalboy20@yahoo.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Ciamis, 29 September 1992
d.	Agama	:	Islam
i.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Dsn. Baregbeg Ds Baregbeg Kecamatan Lakbok Ciamis
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Penyusunan Skripsi Dengan Judul : "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis Setelah Pemekaran Daerah".
j.	Lokasi	:	Kabupaten Ciamis
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 November 2015**.

Bandung, 19 Agustus 2015

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tentara Pelajar Nomor 9 Telepon (0265) 771101

Faximile (0265) 771101

Ciamis 46211

Ciamis, 21 Agustus 2015

Kepada :

Nomor : 070.3/772-Kesbangpol
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Ijin Penelitian

Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Ciamis
di-
TEMPAT

- I. Memperhatikan : Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Nomor: 073/1589/VIII/Rekomlit/KESBAK/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- II. Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
3 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : KHOERUL ANAM
NIM : 11340174
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Yogyakarta
Maksud : Mengadakan Penelitian
Lokasi : DPKAD Kabupaten Ciamis
Lamanya : 21 Agustus s/d 21 November 2015
Judul : **"PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN CIAMIS
SETELAH PEMEKARAN DAERAH"**
Penanggung Jawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
- 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS

Kasi Politik Dalam Negeri,



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jabar;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Yayan M.S
Jabatan : Kasi Penagihan Bid. Pajak Daerah
Alamat : Jl. Drs. H. Soejoed No 14 A Ciampis

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :

“PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN”

Oleh saudara :

Nama : Khoerul Anam
NIM : 11340174
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : IX
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, Agustus 2015

Pihak yang diwawancarai

*KASI PENAGIHAN
BID. PAJAK DAERAH*

(...YAYAN M.S.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : *Fauzi Mulyana*
Jabatan : *Kepala Seksi Perencanaan Belanja Langsung
Kelurahan Kertasari kec. Ciamis Kab. Ciamis*
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :

“PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS SETELAH PEMEKARAN”

Oleh saudara :

Nama : Khoerul Anam
NIM : 11340174
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : IX
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, Agustus 2015

Pihak yang diwawancarai


(Fauzi Mulyana)

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

NOMORURUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,975,080,512,019.00	2,005,621,222,341.00	30,540,710,322.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161,636,566,519.00	182,265,803,546.00	20,629,237,027.00
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	33,712,666,000.00	42,117,034,935.00	8,404,368,935.00
4.1.1.01.00	Pajak Hotel	445,000,000.00	654,320,740.00	209,320,740.00
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga	250,000,000.00	336,564,576.00	86,564,576.00
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua	150,000,000.00	249,948,164.00	99,948,164.00
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	35,000,000.00	52,403,000.00	17,403,000.00
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	10,000,000.00	15,405,000.00	5,405,000.00
4.1.1.02.00	Pajak Restoran	1,968,255,000.00	2,539,755,741.00	571,500,741.00
4.1.1.02.01.	Restoran	270,000,000.00	244,764,162.00	(25,235,838.00)
4.1.1.02.02.	Rumah Makan	879,477,600.00	1,033,127,512.00	153,649,912.00
4.1.1.02.04.	Kantin	230,100,000.00	328,533,013.00	98,433,013.00
4.1.1.02.05.	Katering	588,677,400.00	933,331,054.00	344,653,654.00
4.1.1.03.00	Pajak Hiburan	125,257,000.00	147,179,278.00	21,922,278.00
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5,000,000.00	5,350,000.00	350,000.00
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor	2,700,000.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan	23,885,000.00	39,060,143.00	15,175,143.00
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga	92,187,000.00	99,889,635.00	7,702,635.00
4.1.1.03.20.	Penyewaan Vidio, Kaset,Laer Disk dan sejenisnya	1,485,000.00	1,529,500.00	44,500.00
4.1.1.04.00	Pajak Reklame	907,974,000.00	954,492,354.00	46,518,354.00
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	700,000,000.00	817,907,518.00	117,907,518.00
4.1.1.04.02.	Reklame Kain	200,000,000.00	135,221,111.00	(64,778,889.00)
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker	7,500,000.00	1,363,725.00	(6,136,275.00)
4.1.1.04.06.	Reklame Udara	474,000.00	0.00	(474,000.00)
4.1.1.05.00	Pajak Penerangan Jalan	14,000,000,000.00	19,564,527,202.00	5,564,527,202.00
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	14,000,000,000.00	19,564,527,202.00	5,564,527,202.00
4.1.1.07.00	Pajak Parkir	14,312,000.00	34,803,000.00	20,491,000.00
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir	14,312,000.00	34,803,000.00	20,491,000.00
4.1.1.08.00	Pajak Air Tanah	47,316,000.00	50,393,064.00	3,077,064.00
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah	47,316,000.00	50,393,064.00	3,077,064.00
4.1.1.09.00	Pajak Sarang Burung Walet	2,167,000.00	1,800,000.00	(367,000.00)
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet	767,000.00	520,000.00	(247,000.00)
4.1.1.09.02.	Pajak Sarang Burung Kipnis	1,400,000.00	1,280,000.00	(120,000.00)
4.1.1.11.00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,385,000.00	3,520,000.00	1,135,000.00

4.1.1.11.06.	Pasir	1,635,000.00	1,970,000.00	335,000.00
4.1.1.11.07.	Tanah Liat	750,000.00	1,550,000.00	800,000.00
4.1.1.12.00	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15,000,000,000.00	16,468,744,332.00	1,468,744,332.00
4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15,000,000,000.00	16,468,744,332.00	1,468,744,332.00
4.1.1.13.00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,200,000,000.00	1,697,499,224.00	497,499,224.00
4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,200,000,000.00	1,697,499,224.00	497,499,224.00
	JUMLAH	33,712,666,000.00	42,117,034,935.00	8,404,368,935.00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9,110,768,500.00	9,489,640,021.00	378,871,521.00
4.1.2.01.00	Retribusi Jasa Umum	5,865,809,705.00	6,017,441,892.00	151,632,187.00
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,958,239,400.00	2,054,600,000.00	96,360,600.00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750,506,900.00	927,562,700.00	177,055,800.00
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	25,132,500.00	25,132,500.00	0.00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	275,057,300.00	284,581,500.00	9,524,200.00
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	550,000,000.00	562,058,400.00	12,058,400.00
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	615,000,000.00	943,981,900.00	328,981,900.00
4.1.2.01.11.	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus	9,975,000.00	12,150,000.00	2,175,000.00
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengelolaan Menara Telkomunikasi	1,658,601,555.00	1,183,014,892.00	(475,586,663.00)
4.1.2.01.15.	Retribusi Laboratorium Kontruksi	23,297,050.00	24,360,000.00	1,062,950.00
4.1.2.02.00	Retribusi Jasa Usaha	2,284,116,295.00	2,161,828,180.00	(122,288,115.00)
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	749,582,795.00	966,616,880.00	217,034,085.00
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	476,316,300.00	477,440,900.00	1,124,600.00
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	59,601,800.00	68,700,600.00	9,098,800.00
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	27,000,000.00	27,012,500.00	12,500.00
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	971,615,400.00	622,057,300.00	(349,558,100.00)
4.1.2.03.00	Retribusi Perizinan Tertentu	960,842,500.00	1,310,369,949.00	349,527,449.00
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	691,600,850.00	875,191,488.00	183,590,638.00
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	243,020,000.00	402,020,061.00	159,000,061.00
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	26,000,000.00	31,368,400.00	5,368,400.00
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	221,650.00	1,790,000.00	1,568,350.00
	JUMLAH	9,110,768,500.00	9,489,640,021.00	378,871,521.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,318,017,609.00	3,318,035,285.00	17,676.00
4.1.3.01.00	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daer	3,318,017,609.00	3,318,035,285.00	17,676.00
4.1.3.01.02.	Bank Jabar	2,555,500,000.00	2,555,517,676.00	17,676.00
4.1.3.01.03.	PT Tagati	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
4.1.3.01.04.	PD BPR/ BKPD/ LPK	761,517,609.00	761,517,609.00	0.00
	JUMLAH	3,318,017,609.00	3,318,035,285.00	17,676.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115,495,114,410.00	127,341,093,305.00	11,845,978,895.00
4.1.4.01.00	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	317,705,000.00	192,560,000.00	(125,145,000.00)
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	0.00	30,900,000.00	30,900,000.00
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	75,000,000.00	10,400,000.00	(64,600,000.00)

4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	87,300,000.00	45,350,000.00	(41,950,000.00)
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	5,405,000.00	0.00	(5,405,000.00)
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	100,000,000.00	75,910,000.00	(24,090,000.00)
4.1.4.02.00	Penerimaan Jasa Giro	1,305,109,984.00	2,206,441,237.00	901,331,253.00
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	1,188,688,600.00	2,188,801,228.00	1,000,112,628.00
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	55,000,000.00	3,439,623.00	(51,560,377.00)
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	1,421,384.00	1,421,383.00	(1.00)
4.1.4.02.04.	Jasa Giro BRI	60,000,000.00	12,779,003.00	(47,220,997.00)
4.1.4.03.00	Pendapatan Bunga deposito	5,146,919,500.00	10,787,189,406.00	5,640,269,906.00
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank Jabar	5,059,765,194.00	8,444,082,192.00	3,384,316,998.00
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito pada BRI	87,154,306.00	2,343,107,214.00	2,255,952,908.00
4.1.4.04.00	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	26,552,099.00	13,008,000.00	(13,544,099.00)
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang	25,052,099.00	13,008,000.00	(12,044,099.00)
4.1.4.07.00	Pendapatan Denda Pajak 1)	3,926,434.00	44,918,264.00	40,991,830.00
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2,426,434.00	0.00	(2,426,434.00)
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	519,600.00	519,600.00
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1,500,000.00	5,782,468.00	4,282,468.00
4.1.4.07.12.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe	0.00	38,616,196.00	38,616,196.00
4.1.4.08.00	Pendapatan Denda Retribusi 1)	9,507,705.00	0.00	(9,507,705.00)
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	9,507,705.00	0.00	(9,507,705.00)
4.1.4.09.00	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0.00	224,780,965.00	224,780,965.00
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	224,780,965.00	224,780,965.00
4.1.4.10.00	Pendapatan dari Pengembalian	213,059,478.00	1,354,989,670.00	1,141,930,192.00
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan	0.00	103,386,358.00	103,386,358.00
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan	0.00	14,210,000.00	14,210,000.00
4.1.4.10.07.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	0.00	3,827,820.00	3,827,820.00
4.1.4.10.09.	Pendapatan dari Penerimaan lain-lain	213,059,478.00	1,226,348,108.00	1,013,288,630.00
4.1.4.10.10.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	0.00	950,000.00	950,000.00
4.1.4.10.11.	Pengembalian Taspen	0.00	6,267,384.00	6,267,384.00
4.1.4.11.00	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	92,170,000.00	96,668,000.00	4,498,000.00
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum	92,170,000.00	96,668,000.00	4,498,000.00
4.1.4.15.00	Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Ciamis	67,000,000,000.00	77,149,245,998.00	10,149,245,998.00
4.1.4.15.01.	Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Ciamis	67,000,000,000.00	77,149,245,998.00	10,149,245,998.00
4.1.4.16.00	Pendapatan Pelayanan Kesehatan	41,380,164,210.00	35,271,291,765.00	(6,108,872,445.00)
4.1.4.16.01.	Pendapatan Jamkesmas dan Jampersal	0.00	3,921,860,645.00	3,921,860,645.00
4.1.4.16.02.	Pendapatan Dari BPJS	41,380,164,210.00	31,349,431,120.00	(10,030,733,090.00)
	JUMLAH	115,495,114,410.00	127,341,093,305.00	11,845,978,895.00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,643,690,634,000.00	1,658,997,764,825.00	15,307,130,825.00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,258,897,496,000.00	1,270,347,101,219.00	11,449,605,219.00

1.2.1.1.	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41,300,000,000.00	49,541,065,434.00	8,241,065,434.00
4.2.1.01.00	Bagi Hasil Pajak	41,300,000,000.00	49,541,065,434.00	8,241,065,434.00
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	14,161,500,000.00	22,113,362,091.00	7,951,862,091.00
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 w	25,000,000,000.00	25,070,354,472.00	70,354,472.00
4.2.1.01.07.	Bagi Hasil Cukai Tembakau	2,138,500,000.00	2,357,348,871.00	218,848,871.00
1.2.1.2.	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	16,000,000,000.00	19,208,539,785.00	3,208,539,785.00
4.2.1.02.00	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16,000,000,000.00	19,208,539,785.00	3,208,539,785.00
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,700,000,000.00	1,244,978,721.00	(455,021,279.00)
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	7,000,000,000.00	8,222,185,919.00	1,222,185,919.00
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	3,100,000,000.00	5,508,179,897.00	2,408,179,897.00
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	3,500,000,000.00	3,535,171,352.00	35,171,352.00
4.2.1.02.11.	Bagi hasil dari Pertambangan Umum (Royalti)	500,000,000.00	506,432,691.00	6,432,691.00
4.2.1.02.12.	Bagi hasil dari Perikanan	200,000,000.00	191,591,205.00	(8,408,795.00)
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	1,068,289,296,000.00	1,068,289,296,000.00	0.00
4.2.2.01.00	Dana Alokasi Umum	1,068,289,296,000.00	1,068,289,296,000.00	0.00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1,068,289,296,000.00	1,068,289,296,000.00	0.00
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	133,308,200,000.00	133,308,200,000.00	0.00
4.2.3.01.00	Dana alokasi khusus	133,308,200,000.00	133,308,200,000.00	0.00
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pengajaran / Irrigasi	4,879,700,000.00	4,879,700,000.00	0.00
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	9,889,440,000.00	9,889,440,000.00	0.00
4.2.3.01.04.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	55,846,400,000.00	55,846,400,000.00	0.00
4.2.3.01.05.	Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Perumahan dan Permuk	7,685,100,000.00	7,685,100,000.00	0.00
4.2.3.01.06.	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1,369,560,000.00	1,369,560,000.00	0.00
4.2.3.01.08.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan	4,854,690,000.00	4,854,690,000.00	0.00
4.2.3.01.09.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	12,565,590,000.00	12,565,590,000.00	0.00
4.2.3.01.10.	Dana Alokasi Khusus Bidang keluarga Berencana	1,860,260,000.00	1,860,260,000.00	0.00
4.2.3.01.11.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	8,945,120,000.00	8,945,120,000.00	0.00
4.2.3.01.12.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	1,327,280,000.00	1,327,280,000.00	0.00
4.2.3.01.13.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1,139,580,000.00	1,139,580,000.00	0.00
4.2.3.01.14.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	10,561,190,000.00	10,561,190,000.00	0.00
4.2.3.01.15.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	2,364,170,000.00	2,364,170,000.00	0.00
4.2.3.01.16.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	447,460,000.00	447,460,000.00	0.00
4.2.3.01.17.	Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemda	6,439,940,000.00	6,439,940,000.00	0.00
4.2.3.01.18.	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	3,132,720,000.00	3,132,720,000.00	0.00
JUMLAH		1,258,897,496,000.00	1,270,347,101,219.00	11,449,605,219.00
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	305,058,338,000.00	305,058,338,000.00	0.00
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	305,058,338,000.00	305,058,338,000.00	0.00
4.3.4.01.00	Dana Penyesuaian	305,058,338,000.00	305,058,338,000.00	0.00
4.3.4.01.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	305,058,338,000.00	305,058,338,000.00	0.00
JUMLAH		305,058,338,000.00	305,058,338,000.00	0.00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	79,734,800,000.00	83,592,325,606.00	3,857,525,606.00

1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79,684,800,000.00	83,555,769,933.00	3,870,969,933.00
4.3.3.01.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	79,684,800,000.00	83,555,769,933.00	3,870,969,933.00
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14,600,000,000.00	17,921,354,013.00	3,321,354,013.00
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,900,000,000.00	18,076,131,018.00	5,176,131,018.00
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20,400,000,000.00	23,065,475,161.00	2,665,475,161.00
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	16,975,000.00	17,391,945.00	416,945.00
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	31,767,825,000.00	24,475,417,796.00	(7,292,407,204.00)
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	50,000,000.00	36,555,673.00	(13,444,327.00)
4.3.3.05.00	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi	50,000,000.00	36,555,673.00	(13,444,327.00)
4.3.3.05.03.	Dana Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Laboratorium Kmetrologi	50,000,000.00	36,555,673.00	(13,444,327.00)
	JUMLAH	79,734,800,000.00	83,592,325,606.00	3,857,525,606.00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	2,540,000,000.00	2,516,000,000.00	(24,000,000.00)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	169,753,311,500.00	164,357,653,970.00	(5,395,657,530.00)
4.3.1.10.00	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	2,540,000,000.00	2,516,000,000.00	(24,000,000.00)
4.3.1.10.01.	Hibah PDAM	2,540,000,000.00	2,516,000,000.00	(24,000,000.00)
	JUMLAH	2,540,000,000.00	2,516,000,000.00	(24,000,000.00)
1.3.5.	Pemerintah Desa	167,213,311,500.00	161,841,653,970.00	(5,371,657,530.00)
4.3.5.01.00	Bantuan keuangan dari provinsi	167,213,311,500.00	161,841,653,970.00	(5,371,657,530.00)
4.3.5.01.01.	Bantuan keuangan dari Provinsi	167,213,311,500.00	161,841,653,970.00	(5,371,657,530.00)
	JUMLAH	167,213,311,500.00	161,841,653,970.00	(5,371,657,530.00)

PROSENTASE
6
102%
113%
125%
147%
135%
167%
150%
154%
129%
91%
117%
143%
159%
118%
107%
50%
164%
108%
103%
105%
117%
68%
18%
0%
140%
140%
243%
243%
107%
107%
83%
68%
91%
148%

120%
207%
110%
110%
141%
141%
125%
104%
103%
105%
124%
100%
103%
102%
153%
122%
71%
105%
95%
129%
100%
115%
100%
64%
136%
127%
165%
121%
808%
104%
100%
100%
100%
100%
110%
61%
0%
#DIV/0!
14%

52%
0%
#DIV/0!
76%
169%
184%
6%
100%
21%
210%
167%
2688%
49%
0%
52%
1144%
0%
#DIV/0!
385%
#DIV/0!
0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
636%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
576%
#DIV/0!
#DIV/0!
105%
105%
115%
115%
85%
#DIV/0!
76%
110%
101%
101%

105%
105%
123%
140%
113%
102%
77%
73%
73%
73%
105%
99%
97%
99%
99%
99%
97%
97%
97%
97%

PERBANDINGAN 2010, 2011, 2012 DAN TARGET 2013
LAPORAN REKAPITULASI PAD

NO	Uraian	TARGET T.A. 2010 (Rp.)	REALISASI T.A. 2010 (Rp.)	%	TARGET T.A. 2011 (Rp.)	REALISASI T.A. 2011 (Rp.)	%	TARGET T.A. 2012 (Rp.)	REALISASI 2012 (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PENDAPATAN DAERAH										
A	Pendapatan Asli Daerah									
1	Hasil Pajak Daerah	7,940,582,488.00	8,148,030,206.00	102.61	11,368,701,546.00	12,312,800,086.00	108.30	15,464,900,000.00	17,718,419,272.00	114.57
2	Hasil Retribusi Daerah	35,217,299,118.00	30,786,171,211.00	87.42	42,517,028,632.00	35,248,407,832.00	82.90	17,138,494,102.00	18,571,677,783.00	108.36
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,842,000,000.00	2,311,517,023.00	125.49	2,368,990,172.00	2,368,990,172.00	100.00	2,486,035,599.00	2,486,035,599.00	100.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,468,638,394.00	9,267,157,503.00	109.43	7,899,148,245.00	8,970,337,421.00	113.56	46,628,067,508.00	49,416,381,750.00	105.98
	<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ...</i>	53,468,520,000.00	50,512,875,943.00	94.47	64,153,868,595.00	58,900,535,511.00	91.81	81,717,497,209.00	88,192,514,404.00	107.92
B	DANA PERIMBANGAN									
1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	65,508,986,132.00	76,055,375,785.00	116.10	60,300,000,000.00	85,310,853,708.00	141.48	79,345,166,500.00	98,308,299,173.00	123.90
2	DANA ALOKASI UMUM	867,400,720,000.00	867,400,725,000.00	100.00	953,056,836,000.00	953,056,836,000.00	100.00	1,165,043,374,000.00	1,165,043,374,000.00	100.00
3	DANA ALOKASI KHUSUS	92,253,900,000.00	92,253,900,000.00	100.00	85,246,000,000.00	85,246,000,000.00	100.00	89,651,290,000.00	89,651,290,000.00	100.00
	<i>Jumlah DANA PERIMBANGAN ...</i>	1,025,163,606,132.00	1,035,710,000,785.00	101.03	1,098,602,836,000.00	1,123,613,689,708.00	102.28	1,334,039,830,500.00	1,353,002,963,173.00	101.42
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH									
1	PENDAPATAN HIBAH	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	50.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00	5,000,000,000.00		
2	DANA DARURAT									
3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAIN	35,405,515,929.16	33,248,280,580.00	93.91	34,181,422,600.00	39,690,796,954.00	116.12	49,982,711,594.50	49,982,711,594.00	100.00
4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	121,702,493,400.00	123,118,118,400.00	101.16	269,880,250,440.00	269,880,250,440.00	100.00	247,286,806,000.00	247,286,806,000.00	100.00
5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDAERAH LAINNYA	70,201,543,040.00	75,034,023,040.00	106.88	106,908,327,500.00	105,210,352,355.00	98.41	158,299,676,000.00	128,968,346,600.00	81.47
	<i>Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ...</i>	229,309,552,369.16	232,400,422,020.00	101.35	413,470,000,540.00	417,281,399,749.00	100.92	460,569,193,594.50	426,237,864,194.00	92.55
	<i>Jumlah PENDAPATAN DAERAH ...</i>	1,307,941,678,501.16	1,318,623,298,748.00	100.82	1,576,226,705,135.00	1,599,795,624,968.00	101.50	1,876,326,521,303.50	1,867,433,341,771.00	99.53

Ciamis, Januari 2013

ALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. TOTO MARWOTO, MPd
NIP. 19610817 198803 1 021

TARGET T.A. 2013 (Rp.)
12
21,334,000,000.00
19,925,860,640.00
2,499,347,090.00
46,599,133,451.00
90,358,341,181.00
70,500,000,000.00
1,303,907,527,000.00
95,612,680,000.00
1,470,020,207,000.00
37,000,000,000.00
37,000,000,000.00
1,597,378,548,181.00

**LAPORAN
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**

KABUPATEN CIAMIS
BULAN JUNI TAHUN 2015

BERDASARKAN LAPORAN DARI KAS DAERAH (BANK JABAR CIAMIS)

DINAS PENGELOLA	KODE REKENING					URAIAN	TARGET T.A. 2015 (Rp.)	REALISASI			SELISIH KURANG/LEBIH (Rp.)	PROSENTAS E (%) REALISASI
	E	F	G	H	I			S.D. BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D. BULAN INI (Rp.)		
1	2					3	4	5	6	7	8=(4-7)	9=(7/4*100)
Dinas Kesehatan	4					PENDAPATAN DAERAH						
	4	1				Pendapatan Asli Daerah						
	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah						
	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum						
	4	1	2	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,050,594,000.00					
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	2,050,594,000.00	954,146,000.00	169,039,000.00	1,123,185,000.00	927,409,000.00	54.77
	4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha						
	4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu						
	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah						
	4	1	4	16	1	Pendapatan Jamkesmas untuk Jampersal	50,000,000,000.00	16,071,036,484.00	3,106,706,000.00	19,177,742,484.00	30,822,257,516.00	38.36
	4	1	4	16	2	Pendapatan dari BPJS						
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50,000,000,000.00					
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50,000,000,000.00					
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	52,050,594,000.00	17,025,182,484.00	3,275,745,000.00	20,300,927,484.00	31,749,666,516.00	39.00
0												
RSU Kelas C	4					PENDAPATAN DAERAH						
	4	1				Pendapatan Asli Daerah						
	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah						
	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum						

	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	2	2	Jasa Giro Pemegang Kas	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	15		Pendapatan BLUD RSUD Kelas C Kab. Ciamis						
	4	1	4	15	1	Pendapatan BLUD RSUD Kelas C Kab. Ciamis	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
						Jumlah Pendapatan BLUD RSUD Kelas C Kab. Ciamis	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
						Jumlah Hasil Retribusi Daerah	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
						JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
0												
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, ESDM	4					PENDAPATAN DAERAH						
	4	1				Pendapatan Asli Daerah						
	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah						
	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum						
	4	1	2	1	15	Retribusi Laboratorium Konstruksi	-			-	-	-
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	-			-	-	-
	4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha						
	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	578,928,000.00	158,199,000.00	70,737,000.00	228,936,000.00	349,992,000.00	39.54
						Jumlah Retribusi Jasa Usaha	578,928,000.00	158,199,000.00	70,737,000.00	228,936,000.00	349,992,000.00	39.54
	4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu						
	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah						
	4	1	4	14		Pendapatan dari Sumber Daya Alam						
	4	1	4	14	1	Iuran Eksplorasi/Eksplorasi Bahan Galian Gambut	-			-	-	-
						Jumlah Pendapatan dari Sumber Daya Alam	-			-	-	-
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-			-	-	-
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	578,928,000.00	158,199,000.00	70,737,000.00	228,936,000.00	349,992,000.00	39.54
						JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	578,928,000.00	158,199,000.00	70,737,000.00	228,936,000.00	349,992,000.00	39.54
0												
Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang	4					PENDAPATAN DAERAH						
	4	1				Pendapatan Asli Daerah						
	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah						
	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum						

	4	1	2	1	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	927,562,700.00	410,628,600.00	57,208,200.00	467,836,800.00	459,725,900.00	50.44
	4	1	2	1	11	Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus	12,150,000.00	7,400,000.00	1,500,000.00	8,900,000.00	3,250,000.00	73.25
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	939,712,700.00	418,028,600.00	58,708,200.00	476,736,800.00	462,975,900.00	50.73
	4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha						
	4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu						
	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah						
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum	2,400,000.00			-	(2,400,000.00)	-
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,400,000.00			-	(2,400,000.00)	-
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,400,000.00			-	(2,400,000.00)	-
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	942,112,700.00					
						JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	942,112,700.00	418,028,600.00	58,708,200.00	476,736,800.00		
0												
Dishub	4					PENDAPATAN DAERAH						
	4	1				Pendapatan Asli Daerah						
	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah						
	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum						
	4	1	2	1	5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	275,057,200.00	120,300,000.00	19,330,000.00	139,630,000.00	135,427,200.00	50.76
	4	1	2	1	7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	847,600,000.00	418,165,500.00	77,537,500.00	495,703,000.00	351,897,000.00	58.48
	4	1	2	1	13	Retribusi pengelolaan menara telekomunikasi	1,658,601,600.00	582,886,982.00		582,886,982.00	1,075,714,618.00	35.14
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	2,781,258,800.00	1,121,352,482.00	96,867,500.00	1,218,219,982.00	1,563,038,818.00	43.80
	4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha						
	4	1	2	2	4	Retribusi Terminal	476,786,300.00	195,183,000.00	28,491,900.00	223,674,900.00	253,111,400.00	46.91
	4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	59,601,800.00	25,598,000.00	2,700,000.00	28,298,000.00	31,303,800.00	47.48
						Jumlah Retribusi Jasa Usaha	536,388,100.00	220,781,000.00	31,191,900.00	251,972,900.00	284,415,200.00	46.98
	4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu						
	4	1	2	3	4	Retribusi Izin Trayek	26,000,000.00	11,383,800.00	1,459,200.00	12,843,000.00	13,157,000.00	49.40
						Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	26,000,000.00					
						Jumlah Hasil Retribusi Daerah	3,343,646,900.00					
	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah						
	4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum						
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum	25,020,000.00	11,425,000.00	129,518,600.00	140,943,600.00	(115,923,600.00)	563.32
						Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	25,020,000.00					
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,020,000.00					
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3,368,666,900.00					

				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3,368,666,900.00							
0												
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4			PENDAPATAN DAERAH								
	4	1		Pendapatan Asli Daerah								
	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah								
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	1	3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil			-	-	-	
				Jumlah Retribusi Jasa Umum					-	-	-	
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha							
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu							
	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
				Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					-	-	-	
				Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					-	-	-	
				Jumlah Pendapatan Asli Daerah					-	-	-	
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					-	-	-	
0												
BPPT & PM	4			PENDAPATAN DAERAH								
	4	1		Pendapatan Asli Daerah								
	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah								
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu							
	4	1	2	3	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	691,600,850.00	304,361,074.00	17,127,864.00	321,488,938.00	370,111,912.00	46.48
	4	1	2	3	3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	243,020,000.00	146,795,845.00	14,177,014.00	160,972,859.00	82,047,141.00	66.24
	4	1	2	3	5	Retribusi Izin Usaha Perikanan	221,650.00					
	4	1	4	8	3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	-			-	-	-
				Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		-			-	-	-	
				Jumlah Hasil Retribusi Daerah	934,842,500.00	451,156,919.00	31,304,878.00	482,461,797.00	452,159,053.00	51.61		
				Jumlah Pendapatan Asli Daerah	934,842,500.00							
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	934,842,500.00							
0												
Dinas Pariwisata	4			PENDAPATAN DAERAH								
	4	1		Pendapatan Asli Daerah								
	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah								
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	1	6	Retribusi Pelayanan Pasar			-	-	-	

					Jumlah Retribusi Jasa Umum					-	-	-	
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha								
	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75,912,000.00	40,228,000.00		40,228,000.00	35,684,000.00	52.99	
	4	1	2	2	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	971,615,000.00	104,925,800.00	3,675,600.00	108,601,400.00	863,013,600.00	11.18	
					Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1,047,527,000.00							
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu								
	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah								
	4	1	4	11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum								
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum	10,750,000.00	4,610,000.00		4,610,000.00	6,140,000.00	42.88	
					Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	10,750,000.00							
					Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,750,000.00							
					Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,058,277,000.00	149,763,800.00	3,675,600.00	153,439,400.00	904,837,600.00	14.50		
					JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,058,277,000.00							
0													
DPPKAD	4				PENDAPATAN DAERAH								
	4	1			Pendapatan Asli Daerah								
	4	1	1		Hasil Pajak Daerah								
	4	1	1	1	Pajak Hotel								
	4	1	1	1	1	Hotel Bintang Lima Berlian	-			-	-	-	
	4	1	1	1	2	Hotel Bintang Lima	-			-	-	-	
	4	1	1	1	3	Hotel Bintang Empat	-			-	-	-	
	4	1	1	1	4	Hotel Bintang Tiga	-			-	-	-	
	4	1	1	1	5	Hotel Bintang Dua	-			-	-	-	
	4	1	1	1	6	Hotel Bintang Satu	-			-	-	-	
	4	1	1	1	7	Hotel Melati Tiga	250,000,000.00	105,876,494.00	11,238,682.00	117,115,176.00	(132,884,824.00)	46.85	
	4	1	1	1	8	Hotel Melati Dua	150,000,000.00	52,519,728.00	10,435,000.00	62,954,728.00	(87,045,272.00)	41.97	
	4	1	1	1	9	Hotel Melati Satu	32,504,000.00	22,938,000.00	4,180,000.00	27,118,000.00	(5,386,000.00)	83.43	
	4	1	1	1	10	Motel	-						
	4	1	1	1	11	Cottage	-			-	-	-	
	4	1	1	1	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	6,970,000.00	9,095,000.00	880,000.00	9,975,000.00	3,005,000.00	143.11	
	4	1	1	1	13	Wisma Pariwisata	-						
					Jumlah Pajak Hotel	439,474,000.00	190,429,222.00	26,733,682.00	217,162,904.00		49.41		
	4	1	1	2	Pajak Restoran								
	4	1	1	2	1	Restoran	270,000,000.00	88,330,599.00	13,381,855.00	101,712,454.00	(168,287,546.00)	37.67	

	4	1	1	2	2	Rumah Makan	879,477,600.00	550,581,271.00	77,250,786.00	627,832,057.00	(251,645,543.00)	71.39
	4	1	1	2	3	Cafe	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	2	4	Kantin	230,100,000.00	136,872,617.00	19,579,190.00	156,451,807.00	(73,648,193.00)	67.99
	4	1	1	2	5	Katering	600,000,000.00	468,258,434.00	34,702,804.00	502,961,238.00	(97,038,762.00)	83.83
						Jumlah Pajak Restoran	1,979,577,600.00	1,244,042,921.00	144,914,635.00	1,388,957,556.00		70.16
	4	1	1	3		Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	1	Tontonan Film/Bioskop	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/Korsel	5,000,000.00	1,500,000.00	550,000.00	2,050,000.00	(2,950,000.00)	41.00
	4	1	1	3	3	Kontes Kecantikan	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	4	Kontes Binaraga	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	5	Pameran	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	6	Diskotik	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	7	Karaoke	-	2,600,000.00	400,000.00	3,000,000.00	-	-
	4	1	1	3	8	Klub Malam	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	9	Sirkus/Akrobat/Sulap	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	10	Permainan Bilyar	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	11	Permainan Golf	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	12	Permainan Bowling	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	13	Pacuan Kuda	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	14	Balap Kendaraan Bermotor	2,700,000.00	850,000.00	-	850,000.00	(1,850,000.00)	31.48
	4	1	1	3	15	Permainan Ketangkasan	23,885,000.00	17,472,551.00	3,917,825.00	21,390,376.00	(2,494,624.00)	89.56
	4	1	1	3	16	Panti Pijat/Refleksi	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	17	Mandi Uap/Spa	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	18	Pusat Kebugaran	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	3	19	Pertandingan Olah Raga	92,187,000.00	70,155,970.00	3,020,100.00	73,176,070.00	(19,010,930.00)	79.38
	4	1	1	3	20	Penyewaan Video, Kaset, Laser Disk dan sejenisnya	1,485,000.00	667,500.00	-	667,500.00	(817,500.00)	44.95
	4	1	1	3	21	Usaha yang memperlihatkan/menikmati keindahan alam	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Pajak Hiburan	125,257,000.00	93,246,021.00	7,887,925.00	101,133,946.00	(27,123,054.00)	286.36
	4	1	1	4		Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	4	1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	700,000,000.00	220,530,360.00	53,545,697.00	274,076,057.00	(425,923,943.00)	39.15
	4	1	1	4	2	Reklame Kain	200,000,000.00	39,416,774.00	6,836,590.00	46,253,364.00	(153,746,636.00)	23.13
	4	1	1	4	3	Reklame Melekat/Stiker	7,500,000.00	-	-	-	(7,500,000.00)	-
	4	1	1	4	4	Reklame Selebaran	-	-	-	-	-	-
	4	1	1	4	5	Reklame Berjalan	-	-	-	-	-	-

	4	1	1	4	6	Reklame Udara	475,000.00				-	(475,000.00)	-
	4	1	1	4	7	Reklame Apung	-				-	-	-
	4	1	1	4	8	Reklame Suara	-				-	-	-
	4	1	1	4	9	Reklame Film/Slide	-				-	-	-
	4	1	1	4	10	Reklame Peragaan	-				-	-	-
						Jumlah Pajak Reklame	907,975,000.00	259,947,134.00	60,382,287.00	320,329,421.00		35.28	
	4	1	1	5		Pajak Penerangan Jalan							
	4	1	1	5	1	Pajak Penerangan Jalan PLN	16,487,227,837.00	8,910,458,258.00	1,801,513,272.00	10,711,971,530.00	5,775,256,307.00	64.97	
						Jumlah Pajak Penerangan Jalan	16,487,227,837.00						
	4	1	1	7		Pajak Parkir							
	4	1	1	7	1	Pajak Parkir	14,312,000.00						
						Jumlah Pajak Parkir	14,312,000.00	14,422,000.00	1,949,000.00	16,371,000.00	(2,059,000.00)	114.39	
	4	1	1	8		Pajak Air Tanah							
	4	1	1	8	1	Pajak Air Tanah	47,316,000.00						
						Jumlah Pajak Air Tanah	47,316,000.00	15,775,034.00	110,046.00	15,885,080.00	31,430,920.00	33.57	
	4	1	1	9		Pajak Sarang Burung Walet							
	4	1	1	9	1	Pajak Sarang Burung Walet	767,000.00	400,000.00		400,000.00	367,000.00	52.15	
	4	1	1	9	2	Pajak Sarang Burung Kipin	1,400,000.00						
						Jumlah Pajak Sarang Burung Walet	2,167,000.00						
	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan							
	4	1	1	11	4	Batu Kapur	-						
	4	1	1	11	5	fospat		462,000.00		462,000.00			
	4	1	1	11	6	Pasir	1,635,000.00	575,000.00		575,000.00	1,060,000.00	35.17	
	4	1	1	11	7	Tanah Liat	750,000.00				(750,000.00)	-	
	4	1	1	11	8	Tanah Urug	-				-	-	
	4	1	1	11	9	Andesit	-				-	-	
						Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,385,000.00						
	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan							
	4	1	1	12	1	PBB Perdesaan dan Perkotaan	15,164,168,680.00	10,665,588,530.00	2,278,837,854.00	12,944,426,384.00	2,219,742,296.00	85.36	
						Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15,164,168,680.00						
	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan							
	4	1	1	13	1	BPHTB	1,000,000,000.00	488,647,690.00	125,100,550.00	613,748,240.00	386,251,760.00	61.37	
						Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1,000,000,000.00						
						Jumlah Hasil Pajak Daerah	36,169,860,117.00	21,883,531,810.00	4,447,429,251.00	26,330,961,061.00		72.80	

	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah							
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha							
	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	103,456,840.00	73,966,658.00	19,440,230.00	93,406,888.00	10,049,952.00	90.29
					Jumlah Retribusi Jasa Usaha	103,456,840.00						
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu							
	4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
	4	1	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Perusahaan Milik Daerah							
	4	1	3	1	1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	-			-	-	
	4	1	3	1	2	Dividen Bank Jabar	2,555,517,676.00	2,342,830,545.00		2,342,830,545.00	212,687,131.00	91.68
	4	1	3	1	3	PT TAGATI	1,000,000.00			-	(1,000,000.00)	
	4	1	3	1	4	PD BPR / BKPD / LPK	761,517,600.00	784,733,520.00		784,733,520.00	(23,215,920.00)	103.05
	4	1	3	2	1	BUMN	-			-	-	
					Jumlah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Perusahaan Milik Daerah	-				-	-	
					Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,318,035,276.00	3,127,564,065.00		3,127,564,065.00	188,471,211.00	94.26	
	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
	4	1	4	1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan							
	4	1	4	1	2	Penjualan peralatan/ perlengkapan kantor yang tidak terpakai					-	
	4	1	4	1	3	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai	-	43,900,000.00		43,900,000.00		
	4	1	4	1	5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	75,000,000.00			-	(75,000,000.00)	
	4	1	4	1	6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	87,300,000.00	24,400,000.00		24,400,000.00	62,900,000.00	27.95
	4	1	4	1	7	Penjualan Drum Bekas	5,405,000.00			-	(5,405,000.00)	
	4	1	4	1	8	penjualan hasil penebangan pohon		148,500,000.00		148,500,000.00		
	4	1	4	1	10	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan	100,000,000.00	20,500,000.00	20,700,000.00	41,200,000.00	58,800,000.00	41.20
					Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	317,705,000.00	148,500,000.00	74,800,000.00	223,300,000.00	(94,405,000.00)	70.29	
	4	1	4	2	Penerimaan Jasa Giro							
	4	1	4	2	1	Jasa Giro Kas Daerah	1,188,688,600.00	927,263,614.00		927,263,614.00	261,424,986.00	78.01
	4	1	4	2	2	Jasa Giro Pemegang Kas	55,000,000.00	9,479,860.00	14,779,442.00	24,259,302.00	30,740,698.00	44.11
	4	1	4	2	3	Jasa Giro Dana Cadangan	-			-	-	
	4	1	4	2	4	Jasa Giro BRI	16,096,662.00	12,431,658.00		12,431,658.00	3,665,004.00	77.23
	4	1	4	2	5	Jasa Giro BNI	-			-	-	
					Jumlah Penerimaan Jasa Giro	1,259,785,262.00	949,175,132.00	14,779,442.00	963,954,574.00	295,830,688.00	76.52	
	4	1	4	3	Pendapatan Bunga Deposito							

	4	1	4	3	1	Rekening Deposito pada Bank Jabar	6,059,765,194.00	2,691,755,193.00	660,102,739.00	3,351,857,932.00	2,707,907,262.00	55.31
	4	1	4	3	2	Rekening Deposito pada BRI	87,154,306.00	1,518,586,674.00	284,520,554.00	1,803,107,228.00	(1,715,952,922.00)	2,068.87
	4	1	4	3	3	Rekening Deposito pada BNI	-				-	-
	4	1	4	3	4	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	-				-	-
						Jumlah Pendapatan Bunga Deposito	6,146,919,500.00	4,210,341,867.00	944,623,293.00	5,154,965,160.00		83.86
	4	1	4	4		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
	4	1	4	4	1	Kerugian Uang	1,500,000.00				(1,500,000.00)	-
	4	1	4	4	2	Kerugian Barang	-	8,020,000.00	10,100,000.00	18,120,000.00		-
						Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,500,000.00					
	4	1	4	5		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah						
	4	1	4	6		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan						
	4	1	4	6	1	Bidang Pendidikan	-				-	-
	4	1	4	6	2	Bidang Kesehatan	-				-	-
	4	1	4	6	3	Bidang Pekerjaan Umum	-				-	-
	4	1	4	6	4	Bidang Perumahan Rakyat	-				-	-
	4	1	4	6	5	Bidang Penataan Ruang	-				-	-
	4	1	4	6	6	Bidang Perencanaan Pembangunan	-				-	-
	4	1	4	6	7	Bidang Perhubungan	-				-	-
	4	1	4	6	8	Bidang Lingkungan Hidup	-				-	-
	4	1	4	6	9	Bidang Pertanahan	-				-	-
	4	1	4	6	10	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	-				-	-
	4	1	4	6	11	Bidang Pemberdayaan Perempuan	-				-	-
	4	1	4	6	12	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-				-	-
	4	1	4	6	13	Bidang Sosial	-				-	-
	4	1	4	6	14	Bidang Tenaga Kerja	-				-	-
	4	1	4	6	15	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-				-	-
	4	1	4	6	16	Bidang Penanaman Modal	-				-	-
	4	1	4	6	17	Bidang Kebudayaan	-				-	-
	4	1	4	6	18	Bidang Pemuda dan Olah Raga	-				-	-
	4	1	4	6	19	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-				-	-
	4	1	4	6	20	Bidang Pemerintahan Umum	-				-	-
	4	1	4	6	21	Bidang Kepegawaian	-				-	-
	4	1	4	6	22	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-				-	-
	4	1	4	6	23	Bidang Statistik	-				-	-

	4	1	4	6	24	Bidang Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	25	Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	26	Bidang Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	27	Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	28	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	29	Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	30	Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	31	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	32	Bidang Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	6	33	Bidang Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	4	7		Pendapatan Denda Pajak							
	4	1	4	7	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2,000,000.00					(2,000,000.00)	-
	4	1	4	7	2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-					-	-
	4	1	4	7	3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-					-	-
	4	1	4	7	4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2,000,000.00	3,340,864.00			3,340,864.00	(1,340,864.00)	167.04
	4	1	4	7	5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-					-	-
	4	1	4	7	6	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-					-	-
	4	1	4	7	7	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-					-	-
	4	1	4	7	8	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-					-	-
	4	1	4	7	9	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-					-	-
	4	1	4	7	10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan	-					-	-
	4	1	4	7	12	Denda PBB-P2		17,325,129.00	59,987,496.00	77,312,625.00			
	4	1	4	7	13	Denda BPHTBG		10,250,000.00		10,250,000.00			
						Jumlah Pendapatan Denda Pajak	4,000,000.00	30,915,993.00	59,987,496.00	90,903,489.00			
	4	1	4	8		Denda Retribusi							
	4	1	4	8	1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	9,507,705.00					(9,507,705.00)	-
	4	1	4	8	2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-					-	-
	4	1	4	8	3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	-					-	-
						Jumlah Denda Retribusi	9,507,705.00					(9,507,705.00)	-
	4	1	4	9		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan							
	4	1	4	9	1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	-					-	-
	4	1	4	9	2	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	-					-	-

	4	1	4	9	3	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	-				-	-	-
						Jumlah Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-				-	-	-
	4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	-						
	4	1	4	10	1	Pendapatan dari Pengembalian Pph Pasal 21	-						-
	4	1	4	10	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi	-				-	-	-
	4	1	4	10	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemb Gaji & Tunjangan		25,783,131.00		25,783,131.00			-
	4	1	4	10	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemb Perjalanan Dinas	-	15,000.00		15,000.00			-
	4	1	4	10	5	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	-			-			-
	4	1	4	10	6	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai	-	2,470,000.00		2,470,000.00			-
	4	1	4	10	7	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	-	4,162,018.00		4,162,018.00			-
	4	1	4	10	8	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal	-			-			-
	4	1	4	10	9	Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain	500,000,000.00	696,357,801.00	7,906,010.00	704,263,811.00	(204,263,811.00)	140.85	
	4	1	4	10	10	Pendapatan dari pengembalian belanja pegawai	-			-			-
	4	1	4	10	11	Pendapatan dari Pengembalian PT Taspen	-			-			-
						Jumlah Pendapatan dari Pengembalian	500,000,000.00						
	4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-						
	4	1	4	11	1	Fasilitas Sosial	-			-			-
						Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-			-			-
	4	1	4	12		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-						
	4	1	4	13		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-						
	4	1	4	14		Pendapatan dari Sumber Daya Alam	-						
	4	1	4	16		Pendapatan Jamkesmas untuk Jampersal	-						
	4	1	4	18		Pendapatan Dari Piutang	-						
	4	1	4	18	1	DakaBalarea	-	4,162,018.00	1,090,909.00	5,252,927.00			-
	4	1	4	18	2	LUEP	-			-			-
						Jumlah Pendapatan Dari Piutang	-	1,782,180.00		1,782,180.00		1,782,180.00	-
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,239,417,467.00						
						JUMLAH Pendapatan Asli Daerah	47,830,769,700.00						
	4	2				DANA PERIMBANGAN	-						
	4	2	1			BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	-						
	4	2	1	1		Bagia Hasil Pajak	-						
	4	2	1	1	1	Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan	18,500,000,000.00	4,556,286,250.00		4,556,286,250.00	13,943,713,750.00	24.63	

	4	2	1	1	3	Bagi Hasil dr Pph Psl21/ 25 & 29 WP orang pribadi dlm negri	21,500,000,000.00	5,182,401,200.00		5,182,401,200.00	16,317,598,800.00	24.10
	4	2	1	1	7	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	1,030,085,100.00		1,030,085,100.00	-	-
						Jumlah Bagi Hasil Pajak	40,000,000,000.00	9,738,687,450.00		9,738,687,450.00	30,261,312,550.00	24.35
	4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam						
	4	2	1	2	2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,000,000,000.00	444,522,548.00		444,522,548.00	1,555,477,452.00	22.23
	4	2	1	2	4	Bagi Hasil dari luran tetap (land rent)	-	246,396,000.00		246,396,000.00		
	4	2	1	2	8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	12,500,000,000.00	5,877,797,658.00		5,877,797,658.00	6,622,202,342.00	47.02
	4	2	1	2	9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	10,000,000,000.00	4,362,386,676.00		4,362,386,676.00	5,637,613,324.00	43.62
	4	2	1	2	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	6,000,000,000.00	5,336,746,210.00		5,336,746,210.00	663,253,790.00	88.95
	4	2	1	2	11	Bagi hasil dari pertambangan umum (royalti)	1,200,000,000.00	363,646,861.00		363,646,861.00	836,353,139.00	30.30
	4	2	1	2	12	Bagi hasil dari perikanan	300,000,000.00	245,717,533.00		245,717,533.00	54,282,467.00	81.91
						Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	32,000,000,000.00	16,877,213,486.00		16,877,213,486.00	15,369,182,514.00	52.74
						Jumlah BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	72,000,000,000.00	26,615,900,936.00		26,615,900,936.00	45,630,495,064.00	36.97
	4	2	2			DANA ALOKASI UMUM						
	4	2	2	1		Dana Alokasi Umum						
	4	2	2	1	1	Dana Alokasi Umum	1,156,989,995,000.00	578,494,974,000.00		578,494,974,000.00	578,495,021,000.00	50.00
						Jumlah Dana Alokasi Umum	1,156,989,995,000.00					
						Jumlah DANA ALOKASI UMUM	1,156,989,995,000.00					
	4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS						
	4	2	3	1		Dana Alokasi Khusus						
	4	2	3	1	1	Bidang Transportasi/Prasarana Jalan	-					
	4	2	3	1	2	Bidang Pengairan/Irigasi	5,100,700,000.00	3,671,052,000.00		3,671,052,000.00	1,429,648,000.00	71.97
	4	2	3	1	3	Bidang Kesehatan	7,233,280,000.00	3,978,304.00		3,978,304.00	7,229,301,696.00	0.06
	4	2	3	1	4	Bidang Pendidikan	50,630,240,000.00	27,846,632,000.00		27,846,632,000.00	22,783,608,000.00	55.00
	4	2	3	1	5	Bidang Prasarana Perumahan dan Permukiman	-			-	-	-
	4	2	3	1	6	Bidang Lingkungan Hidup	1,765,320,000.00	970,926,000.00		970,926,000.00	794,394,000.00	55.00
	4	2	3	1	7	Bidang Air Bersih	-			-	-	-
	4	2	3	1	8	Bidang Perikanan	3,905,010,000.00	2,147,755,500.00		2,147,755,500.00	1,757,254,500.00	55.00
	4	2	3	1	9	Bidang Pertanian	8,346,280,000.00	11,119,924,000.00		11,119,924,000.00	(2,773,644,000.00)	133.23
	4	2	3	1	10	Bidang Keluarga Berencana	1,710,410,000.00	940,725,500.00		940,725,500.00	769,684,500.00	55.00
	4	2	3	1	11	Bidang Perdagangan	1,835,130,000.00	1,009,321,500.00		1,009,321,500.00	825,808,500.00	55.00
	4	2	3	1	12	DAK bidang sanitasi	2,155,500,000.00	1,185,525,000.00		1,185,525,000.00	969,975,000.00	55.00
	4	2	3	1	13	DAK Kehutanan	1,488,280,000.00	818,554,000.00		818,554,000.00	669,726,000.00	55.00
	4	2	3	1	14	DAK bidang jalan	8,874,890,000.00	4,881,189,500.00		4,881,189,500.00	3,993,700,500.00	55.00

	4	2	3	1	15	DAK bidang air minum	4,519,570,000.00	2,485,763,500.00		2,485,763,500.00	2,033,806,500.00	55.00
	4	2	3	1	16	DAK bidang keselamatan transportasi darat	433,300,000.00	238,315,000.00		238,315,000.00	194,985,000.00	55.00
	4	2	3	1	17	DAK bidang prasarana pemda	4,954,570,000.00	2,725,013,500.00		2,725,013,500.00	2,229,556,500.00	55.00
	4	2	3	1	18	DAK bidang transfortasi perdesaan	-					
	4	2	3	1	19	DAK Bidang Prasarana Daerah Tertinggal	-					
						Jumlah Dana Alokasi Khusus	102,952,480,000.00	60,044,675,304.00		60,044,675,304.00	42,907,804,696.00	58.32
						Jumlah DANA ALOKASI KHUSUS	102,952,480,000.00					
						JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1,331,942,475,000.00					
	4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH						
	4	3	1			PENDAPATAN HIBAH						
	4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						
	4	3	1	1	1	Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	4,038,000,000.00			(4,038,000,000.00)		-
						Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4,038,000,000.00			(4,038,000,000.00)		-
	4	3	1	2		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya						
	4	3	1	3		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam						
	4	3	1	4		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan						
	4	3	1	5		Pendapatan Hibah dari Luar Negeri						
	4	3	2			DANA DARURAT						
	4	3	2	1		Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam						
	4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAIN						
	4	3	3	1		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi						
	4	3	3	1	1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18,315,190,200.00	3,663,038,040.00		3,663,038,040.00	14,652,152,160.00	20.00
	4	3	3	1	3	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15,303,294,000.00	3,060,658,800.00		3,060,658,800.00	12,242,635,200.00	20.00
	4	3	3	1	5	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	29,578,489,500.00	5,915,697,900.00		5,915,697,900.00	23,662,791,600.00	20.00
	4	3	3	1	7	Bagi Hasil dari Pjk Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	15,880,500.00	3,176,100.00		3,176,100.00	12,704,400.00	20.00
	4	3	3	1	8	Bagi Hasil Pajak Rokok	14,500,000,000.00				(14,500,000,000.00)	-
						Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	77,712,854,200.00	12,642,570,840.00	-	12,642,570,840.00	65,070,283,360.00	16.27
	4	3	3	2		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi						
	4	3	3	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-				-	-
						Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-				-	-
	4	3	3	3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten						

	4	3	3	3	1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	-					-	-
						Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	-					-	-
	4	3	3	4		Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota							
	4	3	3	4	1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-					-	-
						Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	-					-	-
	4	3	3	5		Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi							
	4	3	3	5	1	Dana Bagi Hasil Retribusi Pereadaran Hasil Hutan	-					-	-
	4	3	3	5	2	Dana Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-					-	-
	4	3	3	5	3	Dana Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Lab Kmetrologian	37,000,000.00					(37,000,000.00)	-
	4	3	3	5	4	Dana Bagi Hasil Retribusi Pemeriksaan Hewan	-					-	-
						Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Propinsi	37,000,000.00					(37,000,000.00)	-
						Jumlah DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAIN	77,749,854,200.00					(77,749,854,200.00)	-
	4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS							
	4	3	4	1		Dana Penyesuaian							
	4	3	4	1	1	Dana Penyesuaian	-					-	-
	4	3	4	1	2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	373,351,707,000.00	112,005,512,000.00			112,005,512,000.00	261,346,195,000.00	30.00
	4	3	4	1	3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,335,000,000.00					(1,335,000,000.00)	-
						Jumlah Dana Penyesuaian	374,686,707,000.00						
	4	3	4	2		Dana Otonomi Khusus							
	4	3	4	2	1	Dana Otonomi Khusus	73,544,935,633.00	28,217,974,400.00			28,217,974,400.00	45,326,961,233.00	38.37
						Jumlah Dana Otonomi Khusus	73,544,935,633.00					(73,544,935,633.00)	-
						Jumlah DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	448,231,642,633.00	140,223,486,400.00			140,223,486,400.00		31.28
	4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEM DAERAH LAINNYA							
	4	3	5	1		Bantuan Keuangan dari Provinsi							
	4	3	5	1	1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	-					-	-
						Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi	-					-	-
						Jumlah BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEM DAERAH LAINNYA	-					-	-
						Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	530,019,496,833.00						
						JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,909,792,741,533.00						
0													
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	4					PENDAPATAN DAERAH							
	4	1				Pendapatan Asli Daerah							

	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah							
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha							
					Jumlah Retribusi Jasa Usaha				-	-	-	
					Jumlah Hasil Retribusi Daerah				-	-	-	
					Jumlah Pendapatan Asli Daerah				-	-	-	
					JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				-	-	-	
0												
Disnak	4				PENDAPATAN DAERAH							
	4	1			Pendapatan Asli Daerah							
	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah							
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	1	6	Retribusi Pelayanan Pasar	-			-	-	
					Jumlah Retribusi Jasa Umum	-			-	-	-	
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha							
	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	19,000,000.00	8,350,000.00		8,350,000.00	10,650,000.00	30.79
	4	1	2	2	8	Retribusi Rumah Potong Hewan	27,000,000.00	7,062,500.00	1,250,000.00	8,312,500.00	18,687,500.00	30.79
					Jumlah Retribusi Jasa Usaha	46,000,000.00	15,412,500.00	1,250,000.00	16,662,500.00	29,337,500.00	61.57	
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu							
	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
	4	1	4	11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum							
					Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				-	-	-	
					Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				-	-	-	
					Jumlah Pendapatan Asli Daerah	46,000,000.00						
					JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	46,000,000.00						
0												
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4				PENDAPATAN DAERAH							
	4	1			Pendapatan Asli Daerah							
	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah							
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	2	Retribusi Jasa Usaha							
	4	1	2	3	Retribusi Perizinan Tertentu							
	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
	4	1	4	11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum							
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum			-	-	-	

				Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum								
				Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah								
				Jumlah Pendapatan Asli Daerah								
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH								
Dinas Koperindag	4			PENDAPATAN DAERAH								
	4	1		Pendapatan Asli Daerah								
	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah								
	4	1	2	1	Retribusi Jasa Umum							
	4	1	2	1	6	Retribusi Pelayanan Pasar	600,000,000.00	237,286,400.00	35,988,800.00	273,275,200.00	326,724,800.00	45.55
						Jumlah Retribusi Jasa Umum	600,000,000.00	237,286,400.00	35,988,800.00	273,275,200.00	326,724,800.00	45.55
	4	1	2	2		Retribusi Jasa Usaha						
	4	1	2	2	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		-				
						Jumlah Retribusi Jasa Usaha		-				
	4	1	2	3		Retribusi Perizinan Tertentu						
	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah						
	4	1	4	11		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum						
	4	1	4	11	2	Fasilitas Umum	42,000,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00	24,400,000.00	41.90
						Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	42,000,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00	24,400,000.00	41.90
						Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42,000,000.00	17,600,000.00		17,600,000.00	24,400,000.00	41.90
						Jumlah Pendapatan Asli Daerah	642,000,000.00	254,886,400.00	35,988,800.00	290,875,200.00	351,124,800.00	45.31
						JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	642,000,000.00	254,886,400.00	35,988,800.00	290,875,200.00	351,124,800.00	45.31

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
LAPORAN REKAPITULASI PAD
BULAN Juni TAHUN 2015

Diurutkan Berdasarkan Dinas/Badan/Lembaga/Kantor Pengelola

NO.	Nama Dinas	TARGET T.A. 2015 (Rp.)	REALISASI			SELISIH KURANG/LEBIH (Rp.)	PROSENTE SE (%) REALISASI
			S.D. BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D. BULAN INI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7=(6-3)	8=(6/3*100)
1	Dinas Kesehatan	52,050,594,000.00	17,025,182,484.00	3,275,745,000.00	20,300,927,484.00	31,749,666,516.00	39.00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	64,000,000,000.00	25,655,401,965.00		25,655,401,965.00	38,344,598,035.00	40.09
3	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, ESDM	578,928,000.00	158,199,000.00	70,737,000.00	228,936,000.00	349,992,000.00	39.54
4	Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang	942,112,700.00	418,028,600.00	58,708,200.00	476,736,800.00	465,375,900.00	50.60
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3,368,666,900.00	1,364,942,282.00	129,518,600.00	1,494,460,882.00	1,874,206,018.00	44.36
6	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PM	934,842,500.00	451,156,919.00	31,304,878.00	482,461,797.00	452,380,703.00	51.61
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,058,277,000.00	149,763,800.00	3,675,600.00	153,439,400.00	904,837,600.00	14.50
8	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	47,830,769,700.00	31,254,688,630.00	5,526,056,631.00	36,780,745,261.00	11,050,024,439.00	76.90
9	Dinas Peternakan dan Perikanan	46,000,000.00	15,412,500.00	1,250,000.00	16,662,500.00	29,337,500.00	36.22
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	642,000,000.00	254,886,400.00	35,988,800.00	290,875,200.00	351,124,800.00	45.31
	jumlah	171,452,190,800.00	76,747,662,580.00	9,132,984,709.00	85,880,647,289.00	85,571,543,511.00	50.09

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
LAPORAN REKAPITULASI PAD
BULAN JUNI TAHUN 2015

Diurutkan Berdasarkan Kode Rekening

NO.	Uraian	TARGET T.A. 2015 (Rp.)	REALISASI			SELISIH KURANG/LEBIH (Rp.)	PROSENTASE (%) REALISASI
			S.D. BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D. BULAN INI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7=(6-3)	8=(6/3*100)
PENDAPATAN DAERAH							
A	Pendapatan Asli Daerah						
1	Hasil Pajak Daerah	36,169,860,117.00	21,883,531,810.00	4,447,429,251.00	26,330,961,061.00	9,838,899,056.00	72.80
2	Hasil Retribusi Daerah	9,644,707,940.00	3,785,337,759.00	342,117,680.00	4,127,455,439.00	5,517,252,501.00	42.80
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,318,035,276.00	3,127,564,065.00		3,127,564,065.00	188,471,211.00	94.26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122,319,587,467.00	23,742,282,570.80	4,084,777,147.00	27,827,059,717.80	94,492,527,749.20	22.75
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ...</i>		171,452,190,800.00	52,538,716,204.80	8,874,324,078.00	61,413,040,282.80	110,037,150,517.20	35.82
B	DANA PERIMBANGAN						
1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	72,000,000,000.00	26,615,900,936.00		26,615,900,936.00	45,630,495,064.00	36.97
2	DANA ALOKASI UMUM	1,156,989,995,000.00	578,494,974,000.00		578,494,974,000.00	578,495,021,000.00	50.00
3	DANA ALOKASI KHUSUS	102,952,480,000.00	60,044,675,304.00		60,044,675,304.00	42,907,804,696.00	58.32
<i>Jumlah DANA PERIMBANGAN ...</i>		1,331,942,475,000.00	665,155,550,240.00		665,155,550,240.00	667,033,320,760.00	49.94
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH						
1	PENDAPATAN HIBAH	4,038,000,000.00	4,038,000,000.00			4,038,000,000.00	
2	DANA DARURAT						
3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAIN	77,749,854,200.00	12,642,570,840.00	-	12,642,570,840.00	65,070,283,360.00	16.27
4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	448,231,642,633.00	140,223,486,400.00		140,223,486,400.00	308,008,156,233.00	31.28
5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDAERAH LAINNYA	-					

6		-					
	<i>Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ...</i>	530,019,496,833.00	156,904,057,240.00		152,866,057,240.00	377,116,439,593.00	28.84
	<i>Jumlah PENDAPATAN DAERAH ...</i>	2,033,414,162,633.00	874,598,323,684.80	8,874,324,078.00	879,434,647,762.80	1,153,979,514,870.20	43.25

CURICULUM VITE

A. DATA PRIBADI

Nama : Khoerul Anam
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 29 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Baregbeg, Rt. 13 Rw. 04 Kec. Lakbok
Kab. Ciamis Prov. Jawa Barat
Email : cikalboy20@yahoo.co.id
Facebook : Khoirul Anam
No. HP : 087826130407

B. ORANG TUA

Nama Ayah : Ma'sum Sidiq
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Umi Mu'awanah
Pekerjaan : Petani

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Baregbeg Lulus Tahun 2005
2. MTs N Lakbok Lulus Tahun 2008
3. MAN Cijantung Ciamis Lulus Tahun 2011
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2015